

**PENGARUH PDRB, INFLASI, PENGELUARAN
PEMERINTAH TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI DAERAH KOTA
SE JAWA TENGAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

**UMDATUL HUSNA
NIM. 12020110141052**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Umdatul Husna
Nomor Induk Mahasiswa : 12020110141052
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi Studi
Pembangunan
Judul Skripsi : Pengaruh PDRB, Inflasi, Pengeluaran
Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Di Daerah Kota Se Jawa Tengah
Dosen Pembimbing : Dra. Herniwati Retno Handayani MS

Semarang, 07 April 2015

Dosen Pembimbing

(Dra. Herniwati Retno Handayani MS)

NIP. 19551128 198103 2004

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Umdatul Husna
Nomor Induk : 12020110141052
Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/IInu Ekonomi Studi
pembangunan
Judul Skripsi : Pengaruh PDRB, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Daerah Kota Se
Jawa Tengah

Tanggal dinyatakan lulus ujian pada tanggal.....2015

Tim Penguji

1. Dra. Herniwati Retno Handayani MS (.....)
2. Dr. Hadi Sasana, S.E.,M.Si (.....)
3. Fitri Arianti,S.E.,M.Si (.....)

Mengetahui.
Pembantu Dekan I

Anis Chariri. SE., Mcom., PhD., Akt
NIP.196708091992031001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Umdatul Husna, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Pengaruh PDRB, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah Terhadap pendapatan Asli Daerah Di Daerah Kota Se Jawa Tengah adalah tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan Universitas batal saya terima.

Semarang, 07 April 2015

Yang Membuat Pernyataan,

Umdatul Husna

NIM. 12020110141052

MOTTO DAN PEMBAHASAN

Dahului dengan doa sebelum melangkah dan berbuat

Bila kita berfikir bisa maka kita akan bisa, segalanya mudah karena ada Allah

Hidup berawal dari mimpi dan yakinlah mimpi itu menjadi kenyataan

Jangan biasakan bergantung kepada orang lain, karena bayangan kitapun akan

meninggalkan kita saat gelap

Waktu adalah kesempatan

Hidup untuk berkarya

Orang yang memperbaiki urusannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki

urusannya dengan orang tersebut

“Ali Bin Abi Tholib”

Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan kepada.....

Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mendoakan aku, memberikan semangat dan arahan untuk kelancaran hidupku. Kakak-kakak dan adik-adikku tersayang yang selalu memberi keceriaan baik disaat senang maupun susah.

ABSTRACT

Decentralization is the transfer of responsibilities and revenue from national government to subnational offices. A key objective of the decentralization is to achieve efficient public goods allocation by bringing decision makings close to people. Intergovernmental fiscal relations should be established to guarantee a reasonable balance between expenditure responsibilities and revenue instruments available to regions.

This study aims to analyze the influence PDRB, Inflation and expenditure of development to PAD in Cities Central Java. The data used in this research is secondary data. This study using quantitative analysis method of ordinary least squares analysis / OLS.

The results obtained with the program Eviews 7 That the value of R^2 0.669109 PAD showed variable can be explained by the variable GDP, inflation, government expenditure at 66.9 percent. Regional perekonomi activity in Central Java develop well, so it can increase revenue through taxation.

Keyword :(PAD), PDRB, Inflation, Goverement Ekspenditure

ABSTRAK

Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. PAD sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Potensi pajak dan retribusi yang ditarik oleh pemerintah Kota lebih banyak dibanding dengan Kabupaten.

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis pengaruh PDRB, Inflasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap PAD di Daerah Kota Se Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data skunder dengan menggunakan analisis kuantitatif dengan metode analisis *ordinary least squares/OLS*.

Hasil penelitian yang diperoleh dengan program Eviews 7 Bahwa nilai R^2 sebesar 0,669109 menunjukkan variabel PAD dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah sebesar 66,9 persen. Aktivitas perekonomian di Daerah Kota Se Jawa Tengah berkembang dengan baik, sehingga PAD dapat meningkat melalui penarikan pajak.

Kata kunci :Pendapatan Asli Daerah (PAD). PDRB, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik serta inayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah Terhadap pendapatan Asli Daerah Di Daerah Kota Se Jawa Tengah”. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program S-1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan tanpa adanya dukungan bimbingan, bantuan, saran, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak, Ibu tercinta yang telah mendoakan, mendidik, memberikan yang terbaik buat kami anak-anakmu.
2. Kakak-kakak dan adik-adikku yang selalu mendukung, memberi perhatian, pengertian dan mendoakanku.
3. Bapak Dr. Suharnomo, SE,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Dra. Herniwati Retno Handayani MS selaku dosen pembimbing.
5. Ibu Nenek Woyanti, SE, M.Si selaku dosen wali.

6. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro.
7. Teman-teman kos tembalang baru 4 perumda 42.
8. Ibu Trasdi selaku Ibu kos tembalang baru 4 perumda 42.
9. Teman-teman satu angkatan IESP 2010.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan kuliah penulis dari awal sampai akhir.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan.

Semarang, 07 April 2015

Penulis

Umdatul Husna

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Pengesahan Kelulusan Ujian	iii
Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Motto dan Persembahan	v
<i>Abstract</i>	vi
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1.4. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Landasan Teori	14
2.1.1 Fungsi Pemerintah	14
2.1.2 Sumber PAD	17
2.1.3 PDRB	22
2.1.4 Hubungan PDRB dengan PAD.....	23
2.1.5 Inflasi	24
2.1.6 Hubungan Inflasi dengan PAD	25
2.1.7 Pengeluaran Pemerintah	26
2.1.8 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan PAD .	29
2.2 Penelitian Terdahulu	30
2.3 Kerangka Pemikiran	36

2.4	Hipotesis.....	38
BAB III	METODE PENELITIAN	39
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	39
3.2	Jenis dan Sumber Data	40
3.3	Metode Pengumpulan Data	41
3.4	Metode Analisis.....	41
3.4.1	Deteksi Asumsi klasik	42
3.4.1.1	Deteksi Multikolinearitas	42
3.4.1.2	Deteksi Heterokedastisitas.....	42
3.4.1.3	Deteksi Autokorelasi	43
3.4.1.4	Deteksi Normalitas	44
3.4.2	Pengujian Statistik	44
3.4.2.1	Uji F.....	44
3.4.2.2	Uji t.....	45
3.4.2.3	Koefisien Determinasi	46
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1.	Gambaran Umum.....	48
4.1.1	Gambaran Umum Penelitian.....	48
4.1.2	PAD di Daerah Kota Se Jawa Tengah.....	48
4.1.3	PDRB di Daerah Se Jawa Tengah	49
4.1.4	Inflasi di Daerah Se Jawa Tengah	50
4.1.5	Pengeluaran Pemerintah di Daerah Se Jawa Tengah	50
4.2.	Analisis Data	51
4.2.1	Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik	51
4.2.1.1	Deteksi Multikolinearitas	52
4.2.1.2	Deteksi Heterokedastisitas.....	53
4.2.1.3	Deteksi Autokorelasi	54
4.2.1.4	Deteksi Normalitas	55
4.2.2	Hasil Pengujian Statistik	55
4.2.2.1	Uji F.....	55

4.2.2.2 Uji t (Individual).....	56
4.2.2.3 Koefisien Determinasi	57
4.2.2.4 Hasil Analisis Regresi	57
4.3. Interpretasi Hasil Penelitian	57
4.3.1 Pengaruh PDRB terhadap PAD di Daerah Kota Se Jawa Tengah	57
4.3.2 Pengaruh Inflasi terhadap PAD di Daerah Kota Se Jawa Tengah	58
4.3.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PAD di Daerah Kota Jawa Tengah.....	59
BAB V PENUTUP	61
5.1. Kesimpulan	61
5.2. Keterbatasan Penelitian	62
5.3. Saran.....	62
Daftar Pustaka	63
Lampiran	66

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Porasi Dana Perimbangan Terhadap APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012	3
Tabel 1.2	Perkembangan PDRB Perkapita di daerah Kota Se Jawa Tengah Tahun 2003-2012 Berdasarkan Harga Konstan 2000	5
Tabel 1.3	Laju Inflasi Di Daerah Kota Se Jawa Tengah tahun 2003-20012	6
Tabel 1.4	Pengeluaran pemerintah Untuk Belanja Modal di Daerah Kota Se Jawa Tengah Tahun 2003-2012	7
Tabel 2.1	Matriks Penelitian Terdahulu	31
Tabel 4.1	PAD Di Daerah Kota Se Jawa Tengah	49
Tabel 4.6	Hasil Deteksi Multikolinearitas dengan <i>Auxiliary Regression</i>	52
Tabel 4.7	Hasil Heterokedastisitas dengan <i>White Test</i>	53
Tabel 4.8	Hasil Deteksi Autokorelasi dengan Bruesh-Godfrey Serial Correlation	54

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Pemerintah dan Kesejahteraan Publik	16
Gambar 2.2	Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	29
Gambar 2.3	Kerangka Pemikiran Teori	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Berbagai kegiatan pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan yang merata ke setiap daerah yang cenderung masih memiliki kelemahan dalam penerimaan pendapatan.

Pola hubungan pemerintah antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat mengalami perubahan, yang sebelumnya era sentralistik yaitu memusatkan seluruh wewenang kepada pusat berubah menjadi era desentralisasi yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan wujud dari berlakunya desentralisasi di Indonesia. Otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas kepada daerah untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki sebesar-besarnya dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Disisi lain pemerintah daerah harus mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing sebagai upaya memperbesar kemampuan daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan

merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad dalam Azzumar, 2011). Pemerintah daerah dituntut untuk lebih bisa mandiri dalam mengelola penerimaan daerah yang bertujuan untuk membiayai pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang baik dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal memberikan peluang pada pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya secara efektif, dengan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan disektor publik. Untuk itu harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai yang berasal dari PAD. Sebagian besar daerah mengalami masalah keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, karena sumber penerimaan PAD potensinya rendah. Oleh sebab itu setiap pemerintah daerah berupaya untuk dapat meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri termasuk meningkatkan perolehan PAD dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

PAD sebagai salah satu penerimaan daerah, mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diatur oleh UU No. 32 tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan salah

satu tolok ukur dalam pelaksanaan pembangunan daerah, akan tetapi PAD tersebut masih belum cukup untuk membiayai pembangunan apabila dilihat dari proporsi PAD terhadap APBD. selain mengandalkan PAD dalam membiayai pengeluaran pembangunan daerah, Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah juga mengandalkan kepada sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Era otonomi daerah belum menunjukkan pemerintah daerah memiliki kemandirian dalam pembiayaan pembangunannya, hal tersebut tampak dari masih tingginya porsi nilai DAU dari APBN. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Porsi Dana Perimbangan Terhadap APBD Propinsi Jawa Tengah
Tahun 2008-2012 (Ribu Rupiah)

Tahun	Dana Perimbangan			Total Dana Perimbangan
	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	DAU	DAK	
2008	450.692.147	1.053.491.871	0	1.504.413.993
2009	557.673.479	1.130.742.601	3.437.000	1.695.290.930
2010	614.565.942	1.168.787.757	28.304.250	1.811.657.949
2011	662.225.501	1.276.180.223	51.789.800	1.950.195.524
2012	751.282.698	1.516.892.951	50.630.450	2.318.806.099

Sumber: BPS Jawa Tengah Dalam Angka, diolah

Data tahun 2008-2012 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan DAU Jawa Tengah dari APBN masih tinggi dan terus mengalami peningkatan. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan diantaranya adalah PDRB, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah. Pengembangan potensi kemandirian daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) didasarkan pada undang-undang yang berlaku melalui pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah guna membiayai pembangunan daerah.

Dapat diketahui bahwa Kota merupakan kawasan pemukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung aktivitas kehidupan masyarakat yaitu sebagai pusat produksi, perdagangan, pemerintahan, sosial dan kebudayaan, sarana olahraga dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan perolehan PAD antara Kota dan Kabupaten sangat berbeda, karena jenis potensi pajak dan retribusi yang dapat ditarik oleh pemerintah Kota lebih banyak dibandingkan dengan Kabupaten. Berdasarkan uraian diatas tentang perbedaan perolehan PAD dari beberapa pungutan pajak antara Kota yang lebih berpotensi dari pada Kabupaten, maka studi kasus dalam penelitian ini menggunakan Kota-Kota Se-Jawa Tengah antara lain Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Serakarta, Kota Magelang.

Semakin tinggi pendapatan perkapita riil suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahnya. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah , semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Sehingga kemampuan masyarakat membayar pajak yang meningkat. Perkembangan PDRB perkapita di Daerah Kota Se awa Tengah dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Perkembangan PDRB Perkapita Di Daerah Kota Se Jawa Tengah
Tahun 2003-2012 Berdasarkan Harga Konstan 2000 (Rupiah)

Tahun	PDRB di Daerah Kota Se Jawa Tengah					
	Magelang	Surakarta	Salatiga	Semarang	Pekalongan	Tegal
2003	7.049.757,23	7.093.055,05	4.892.781,68	11.703.362,34	5.608.222,12	3.707.065,64
2004	7.168.977,68	7.263.885,30	5.025.933,47	12.012.570,66	5.859.615,53	3.589.170,73
2005	7.888.622,11	7.220.682,75	4.103.405,42	11.503.021,77	6.371.499,78	4.087.745,14
2006	7.612.207,32	7.930.485,11	4.392.214,83	12.053.388,15	6.536.290,72	4.291.327,99
2007	7.828.477,93	8.351.806,79	4.716.483,05	12.651.241,91	6.712.280,18	4.502.533,60
2008	8.000.412,12	8.669.633,71	4.924.587,00	12.990.524,20	6.914.249,86	4.705.899,88
2009	8.338.057,75	9.121.278,65	4.771.289,44	13.396.289,90	7.144.807,46	4.882.189,69
2010	9.376.872,93	10.222.533,82	5.355.710,13	13.718.972,36	7.414.470,64	5.348.302,69
2011	9.876.872,93	10.823.131,96	5.634.227,91	14.591.731,87	7.809.172,26	5.585.841,63
2012	10.511.033,83	11.478.192,93	5.937.907,00	15.477.609,72	8.234.240,79	5.865.458,57

Sumber : BPS PDRB Jawa Tengah

Pertumbuhan PDRB Propinsi Jawa Tengah yang meningkat dari tahun ke tahun tentunya merupakan potensi yang sangat menguntungkan bagi pemerintah daerah untuk menaikkan PAD. Simanjutak dalam Halim (2001), juga mengemukakan jika suatu daerah dapat mengelola sumber daya alam yang dimiliki dan perekonomiannya berkembang dengan baik maka PDRB perkapita akan meningkat yang memperkuat PAD suatu daerah.

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Inflasi menimbulkan beberapa efek buruk pada perekonomian salah satunya mengurangi pendapatan riil (Sukirno,2004). Tetapi dengan adanya inflasi maka upah atau gaji juga naik, karena upah riil tergantung pada produktivitas marjinal tenaga kerja. Kesejahteraan ekonomi tergantung pada harga relatif, bukan pada seluruh tingkat harga. Penelitian Simanjutak dalam Halim (2001) mengemukakan bahwa inflasi akan meningkatkan PAD yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak hotel dan pajak

restoran. Hal ini karena jika inflasi melambat, pengusaha akan cenderung menaikkan sedikit harga tetapi upah yang dibayarkan tetap. Laju inflasi di daerah Kota Se Jawa Tengah Tahun 2003-2012 dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Laju Inflasi Di Daerah Kota Se Jawa Tengah Tahun 2003-2012

Tahun	Inflasi di Daerah Kota Se Jawa Tengah					
	Magelang	Surakarta	Salatiga	Semarang	Pekalongan	Tegal
2003	4,46	8,64	4,83	13,56	1,16	11,27
2004	8,39	5,15	10,08	5,98	1,17	5,25
2005	12,32	13,88	15,33	16,46	8,09	18,39
2006	4,25	6,18	7,8	6,68	1,24	7,73
2007	5,76	3,28	7,99	6,75	1,05	8,89
2008	9,15	6,96	10,23	10,34	2,23	8,52
2009	3,48	2,63	4,99	3,19	1,11	5,83
2010	6,8	4,37	7,5	6,1	1,27	5,31
2011	4,15	4,22	2,22	6,66	0,83	8,42
2012	4,65	2,87	3,9	4,85	1,17	3,09

Sumber: BPS Jawa tengah Dalam Angka, diolah

Pengeluaran pemerintah bagian dari kebijakan fiskal yang merupakan tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah akan menghasilkan produk-produk yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kemajuan tingkat perekonomian. Proses pertumbuhan kegiatan ekonomi dalam masyarakat akan meningkatkan PAD bagi pemerintah daerah. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat juga akan meningkatkan pendapatan mereka yang pada gilirannya akan meningkatkan konsumsi, dan pada akhirnya akan menaikkan PAD melalui sumber pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan lain-lain pendapatan daerah. Pengeluaran pemerintah di Daerah Kota Se Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4
Pengeluaran Pemerintah Untuk Belanja Modal Di Daerah Kota
Se Jawa Tengah Tahun 2003-2012 (Rupiah)

Tahun	Pengeluaran Pemerintah di Daerah Kota Se Jawa Tengah					
	Magelang	Surakarta	Salatiga	Semarang	Pekalongan	Tegal
2003	31.921.559.698	5.631.344.922	46.260.807.897	45.675.983.000	53.362.384.272	50.328.672.630
2004	25.485.400.131	6.441.903.773	35.921.745.776	35.390.764.000	42.965.361.045	66.082.884.908
2005	13.815.861.624	9.130.915.500	28.659.430.095	43.087.868.000	24.046.096.723	69.735.216.454
2006	139.270.396.000	56.799.038.377	50.580.950.239	78.843.971.000	45.837.978.650	73.387.548.000
2007	74.579.047.040	157.061.266.386	46.268.446.375	159.469.841.698	79.157.378.430	85.665.206.000
2008	72.451.726.007	181.340.396.562	55.443.571.679	155.065.660.985	104.148.892.751	94.155.123.000
2009	93.400.924.562	81.881.493.303	126.481.274.235	185.753.513.393	78.256.468.900	122.611.458.480
2010	47.661.416.232	105.162.321.133	89.642.823.676	216.441.366.000	56.558.652.727	66.120.122.000
2011	80.979.034.969	128.443.148.963	77.357.430.859	305.704.393.577	82.344.069.092	93.962.860.000
2012	79.135.573.987	186.150.293.855	124.905.280.107	351.853.782.249	103.505.879.000	73.303.813.000

Sumber: BPS Jawa Tengah Dalam Angka, diolah

Dalam UU No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa setiap pemerintah daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memungut 11(sebelas) jenis pajak dan 3 jenis retribusi. Jenis-jenis pajak tersebut yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan tiga jenis retribusi tersebut adalah retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu.

Triani dan Yeni (2010), dalam penelitiannya, tentang Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2003-2007 di Kabupaten Karanganyar, menyatakan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Karanganyar. Hal ini karena kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam penyusunan PAD Kabupaten Karanganyar mengalami penurunan akan tetapi PDRB-nya selalu meningkat setiap tahunnya. Kondisi inilah yang menyebabkan variabel PDRB yang seharusnya berpengaruh positif terhadap penerimaan PAD, menjadi berpengaruh negatif. Sedangkan variabel penduduk dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PAD. Hasil penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Eni dan Iin (2010), tentang Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2000-2009 di Kota Semarang, yang menyatakan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Semarang tahun 2000-2009. Hal ini disebabkan karena laju inflasi hanya diperlukan dalam pertimbangan perubahan tarif yaitu tarif pajak dan retribusi daerah yang bersifat datar, meskipun tarif pajak

dan retribusi yang ditetapkan tinggi atau rendah. Kondisi inilah yang menyebabkan variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap PAD di Kota Semarang tahun 2000-2009. Sedangkan PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap PAD Kota Semarang.

Harry A.P (2011) dalam penelitiannya, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB dan PAD”, menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pertanian, perikanan dan kelautan, sektor perindustrian dan perdagangan mempunyai pengaruh terhadap PAD melalui PDRB. Hasil penelitian ini berbeda dengan Purbayu dan Rahayu (2005) tentang Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri, menyatakan bahwa pengeluaran pembangunan, Penduduk, PDRB mempunyai pengaruh terhadap PAD. Dari ketiga variabel tersebut yang mempunyai pengaruh paling besar adalah variabel penduduk.

Berdasarkan uraian diatas tentang adanya *research gap* antara penelitian yang dilakukan oleh Triani dan Yeni (2010) dengan Eni dan Iin (2010), Harry (2011) dengan Purbayu dan Rahayu (2005) maka perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk memperjelas pengaruh PDRB, inflasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap PAD. Sehubungan dengan masalah diatas maka muncul pernyataan pengaruh PDRB, inflasi, pengeluaran pemerintah terhadap PAD di Daerah Kota Se Jawa Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Kamampuan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah sangat menentukan berhasil tidaknya dalam menciptakan kemandirian suatu daerah. pada kenyataannya permasalahan yang dihadapi daerah sekarang adalah kondisi ekonomi yang berbeda antar daerah. daerah yang kurang potensi ekonominya akan menghadapi kesulitan untuk meningkatkan PAD. Perbedaan ini menimbulkan harapan yang besar terhadap subsidi dari pemerintah pusat sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah.

Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan sumber pembiayaan yang sangat besar. Terutama untuk investasi yang diharapkan berasal dari dana masyarakat, tetapi dana investasi dari masyarakat masih sangat terbatas, sehingga untuk melaksanakan pembangunan diperlukan campur tangan pemerintah terutama untuk pembiayaan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Salah satu sumber dana pemerintah daerah yang terpenting adalah PAD yang diharapkan terus meningkat. Tetapi PAD belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan daerah karena proporsi PAD masih belum cukup untuk membiayai daerah dan masih perlu dana alokasi umum dari pemerintah pusat.

Triani dan Yeni (2010), dalam penelitiannya, tentang Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2003-2007 di Kabupaten Karanganyar. Menyatakan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Karanganyar, Hal ini karena kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam penyusunan PAD Kabupaten Karanganyar mengalami penurunan akan tetapi PDRB-nya selalu meningkat setiap tahunnya, kondisi inilah

yang menyebabkan variabel PDRB yang seharusnya berpengaruh positif terhadap penerimaan PAD, menjadi berpengaruh negatif. Sedangkan variabel penduduk dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PAD. Hasil penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Eni dan In (2010), tentang Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2000-2009 di Kota Semarang, yang menyatakan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Semarang tahun 2000-2009. Hal ini disebabkan karena laju inflasi hanya diperlukan dalam pertimbangan perubahan tarif yaitu tarif pajak dan retribusi daerah yang bersifat datar, meskipun tarif pajak dan retribusi yang ditetapkan tinggi atau rendah. Kondisi inilah yang menyebabkan variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap PAD di Kota Semarang tahun 2000-2009. Sedangkan PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap PAD Kota Semarang.

Harry A.P (2011) tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Dan PAD. Menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pertanian, perikanan dan kelautan, sektor perindustrian dan perdagangan mempunyai pengaruh terhadap PAD melalui PDRB. Hasil penelitian ini berbeda dengan Purbayu dan Rahayu (2005) Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri. Menyatakan bahwa pengeluaran pembangunan, Penduduk, PDRB mempunyai pengaruh terhadap PAD. Dari ketiga variabel tersebut yang mempunyai pengaruh paling besar adalah variabel penduduk.

Berdasarkan permasalahan diatas dan uraian telaah penelitian terdahulu, masih terdapat “Research gap” antara hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk

memperjelas hasil penelitian yang telah dilakukan, maka timbul pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, pengeluaran pemerintah terhadap PAD di Kota-Kota Se Jawa Tengah?
2. Variabel PDRB, inflasi, pengeluaran pemerintah manakah yang paling berpengaruh terhadap PAD di Kota-Kota Se Jawa Tengah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh Produk Domestik regional Bruto (PDRB), Inflasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Kota Jawa Tengah.
2. Menganalisis pengaruh terbesar variabel PDRB, Inflasi dan Peneluaran Pemerintah manakah yang paling berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Kota Jawa Tengah.

Adapun kegunaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis dan sumbangan pemikiran tentang pembangunan ekonomi daerah.
2. Sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan khususnya pemerintah daerah yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah dalam upaya mendorong perekonomian daerah sehingga dapat tercapai kesejahteraan yang adil dan makmur.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini akan dibagi kedalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

BAB ini menjelaskan latar belakang yang mendasari munculnya masalah dalam penelitian, rumusan masalah. Tujuan serta sistematika penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

BAB ini menguraikan tentang teori-teori yang melandasi penelitian dan menjadi dasar acuan teori untuk menganalisis dalam penelitian serta menjelaskan penelitian terdahulu yang terkait, menggambarkan kerangka Pemikiran dan menarik hipotesis.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

BAB ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional, serta jenis dan sumber data serta menjelaskan metode penelitian yang dipakai dan data yang digunakan dalam penelitian.

4. BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

BAB ini menjelaskan akan deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil.

5. BAB V : PENUTUP

BAB ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1.1 Fungsi Pemerintah

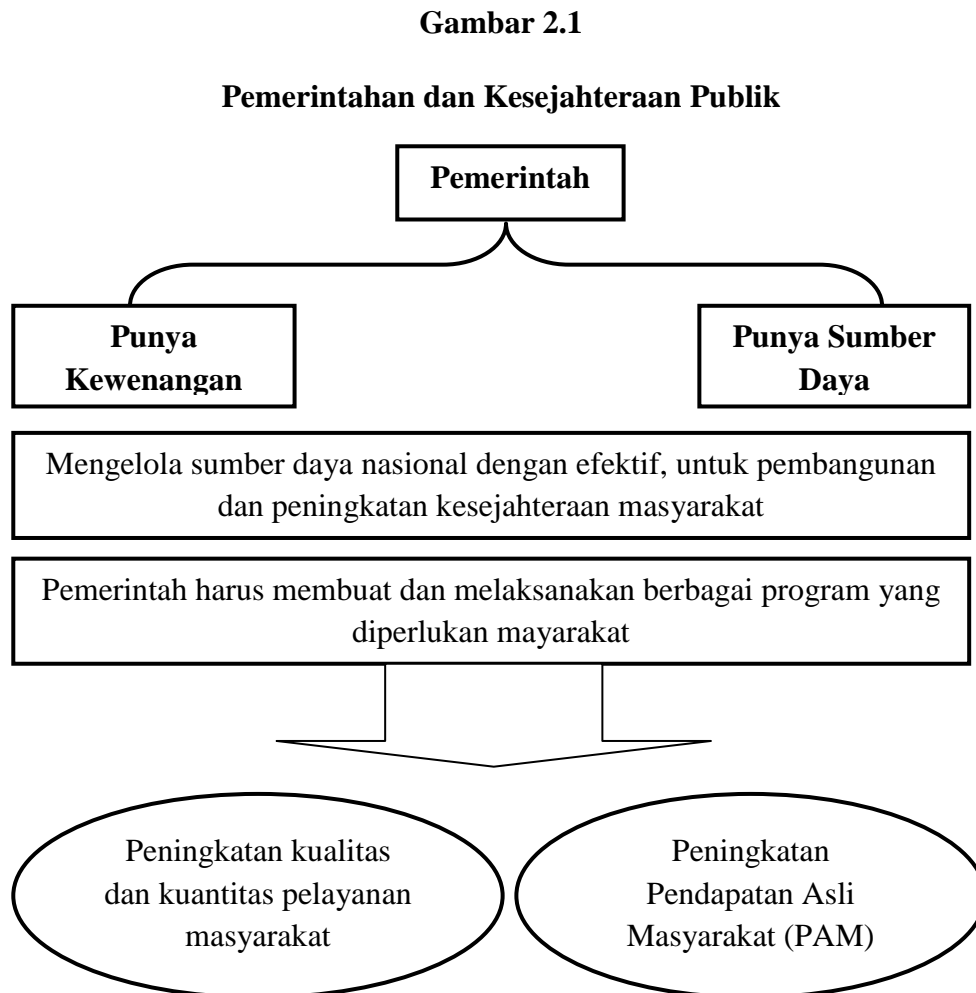
Adam Smith dalam Guritno (1993) menyatakan, pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi: 1) fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan, 2) fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan, 3) fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya jalan, dam-dam dan sebagainya. Adam Smith juga mengatakan bahwa lingkup aktivitas pemerintah sangat terbatas, yaitu hanya melaksanakan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh pihak swasta. Peranan pemerintah meliputi tiga bidang yaitu: 1) melaksanakan peradilan, 2) melaksanakan pertahanan/ keamanan, 3) melaksanakan pekerjaan umum.

Bedasarkan fungsi pemerintah diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah diharapkan mampu mengatur jalannya perekonomian. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki atau mengarahkan aktivitas sektor swasta. Hal ini disebabkan karena sektor swasta tidak dapat mengatasi masalah perekonomian, sehingga perekonomian tidak mungkin diserahkan sepenuhnya kepada sektor swasta.

Henry, 2013 menyatakan bahwa pemerintah adalah pihak yang mewakili dan menjalankan tugas dan fungsi negara dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat suatu wilayah atau negara ditentukan oleh dua hal yaitu: untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dan hak publik akan barang dan jasa untuk hidup layak, serta mendapatkan pelayanan optimal dari negara sesuai hak-hak warga negara. Kedua hal diatas memerlukan kemampuan pemerintah untuk mengadakan berbagai sarana dan fasilitas publik yang diperlukan oleh masyarakat, disamping tentunya juga sebagai jasa pelayanan kebutuhan masyarakat lainnya, seperti masalah pendidikan, kesehatan, ketersediaan barang dan jasa, perlindungan terhadap keamanan, ancaman dan sebagainya.

Henry, 2013 juga menyatakan bahwa pemerintah daerah serta jajarannya harus berperan aktif mendorong dan mengelola ekonomi dimasing-masing daerah, kerja sama secara sinergis, serta dapat menciptakan arus balik yang lebih adil untuk kepentingan masyarakat. Henry (2013) juga menyatakan bahwa negara dibentuk untuk mencapai tujuannya yaitu, mensejahterakan setiap masyarakatnya. Untuk mencaapai kesejahteraan masyarakat tersebut, seluruh rakyat memilih dan menunjuk penyelenggara negara, yang terdiri dari eksekutif atau pemerintah, legislatif atau parlemen, dan yudikatif atau penyelenggara kekuasaan kehakiman. Pemerintah mempunyai peranan penting dan strategis yang bertujuan untuk melindungi, meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan semua warganya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sebagai penyelenggara negara tentu

pemerintah mempunyai peranan penting dalam berbagai kehidupan bernegara, seperti terlihat pada Gambar 2.1.



Sumber: Henry Faizal (2013)

Gambar 2.1 terlihat bahwa hakikat sebuah pemerintah adalah untuk berfungsi mewakili negara dalam mencapai tujuan bernegara. Misi utama dari dibentuknya suatu pemerintah dalam suatu negara adalah menjalankan fungsi dan tugas negara. Pemerintah, sebagai penyelenggara negara bertugas melayani kebutuhan dan melindungi kepentingan masyarakat. Secara umum, tugas melayani kebutuhan dan melindungi kepentingan publik dikelompokkan menjadi

dua bagian kelompok besar, yaitu tugas dibidang ekonomi dan tugas diluar bidang ekonomi.

2.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Henry, 2013 menyatakan keberhasilan pemerintah sebagai penyelenggara negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus memikirkan bagaimana meningkatkan pendapatan asli negara atau pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan alat untuk meningkatkan pendapatan asli masyarakat (PAM). Tugas pemerintah dibidang ekonomi publik adalah meningkatkan dan melindungi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sedangkan tugas diluar ekonomi adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan oleh peningkatan pendapatan asli masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli negara atau daerah melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang tergambar dalam APBN/APBD.

Berdasarkan teori Tiebout dalam (Sumarsono dan Hadi Utomo, 2009) yang menjadi landasan konsep desentralisasi fiskal, bahwa dengan adanya pelimpahan wewenang akan meningkatkan kemampuan daerah dalam melayani kebutuhan barang publik dengan lebih baik dan efisien. Kondisi peningkatan pelayanan barang publik ini dalam kaitannya hubungna antar daerah otonom akan memberikan kimpetisi persaingan antar kabupaten/kota untuk memaksimalkan kepuasan masyarakat. Penyebab mendasar dari peningkatan kemampuan tersebut adalah karena pemerintah daerah dipandang lebih mengetahui kebutuhan dan

karaker masyarakatnya, sehingga program-program dari kebijakan pemerintah akan lebih efektif untuk dijalankan. Lebih lanjut Tiebout menyatakan bahwa adanya kebijakan desentralisasi fiskal, secara tidak langsung memunculkan kompetisi antar daerah otonom dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dimana daerah dengan pelayanan yang baik akan memaksimalkan utilitas masyarakat. Davoodi dan Zou (1998) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal akan memunculkan kompetisi atau persaingan antar daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesamaan pandangan antara apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan program yang dilakukan oleh pemerintah daerahnya.

Oates (1993) menyatakan bahwa tingkat kemajuan ekonomi merupakan Outcome dari kesesuaian preferensi masyarakat dengan pemerintah daerah yang tercipta karena semakin pentingnya peran pemerintah daerah dalam otonomi daerah. secara teori desentralisasi fiskal diperkirakan akan memberikan peningkatan ekonomi mengingat pemerintah daerah mempunyai kedekatan dengan masyarakatnya dan mempunyai keunggulan informasi dibanding dengan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan di daerahnya. Tanggung jawab fiskal yang semakin besar oleh pemda dapat menstimulasi pembangunan. Hal ini akan berdampak pada hubungan positif yang akan terjadi antar pendelegasian fiskal yang semakin besar dengan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah. adanya desentralisasi fiskal akan berpotensi memberikan kontribusi dalam bentuk peningkatan efisiensi pemerintah dan laju pertumbuhan ekonomi (Wibowo,2008).

Teori pembangunan dari bawah dalam (Reza, 2009) menyatakan bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada daerah daripada kepada Pemerintah Pusat karena mereka dapat melihat manfaat dalam kemudahan dan pembangunan di daerah mereka. Meskipun demikian makin rendah tingkat pemerintahan daerah maka makin dekat antar mereka yang mengenakan pajak dengan mereka yang membayar pajak. Kebebasan untuk menentukan ruang lingkup, metode penilaian dan tarif pajak sendiri jelas akan mendorong kebebasan dan fleksibilitas dalam pembiayaan pemerintahan daerah.

Salah satu wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. PAD mencerminkan local taxing power yang “cukup” sebagai necessary condition bagi terwujudnya otonomi daerah yang luas karena nilai dan proporsinya yang cukup dominan untuk mendanai daerah (Simanjuntak, 2005). Menurut Guritno Mangkosubroto (1993) menyatakan bahwa pada umumnya penerimaan pemerintah diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pada umumnya penerimaan pemerintah dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak, misalnya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah, baik pinjaman yang berasal dari dalam negeri maupun pinjaman pemerintah yang berasal dari luar negeri.

Salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yakni untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya sehingga pelayanan publik yang dilakukan dapat menjadi lebih efisien dan efektif

(Kuncoro, 2004). Dengan demikian setiap daerah memiliki peluang yang lebih besar untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan memilih sektor ekonomi unggulan berdasarkan potensi sumber daya daerah masing.

Di dalam TAP MPR No. IV/MPR/2000 ditegaskan bahwasanya “kebijakan desentralisasi Daerah diarahkan untuk mencapai peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreativitas Pemda, keselarasan hubungan antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah itu sendiri dalam kewenangan dan keuangan untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan serta penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah”. Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi yang luas maka sumber-sumber keuangan telah banyak bergeser ke daerah baik melalui perluasan basis pajak (*taxing power*) maupun dana perimbangan. Hal ini sejalan dengan makna desentralisasi fiskal yang mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan:

1. kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yang dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tetap mendasarkan batas kewajaran.
2. didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.

Pendapatan asli daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih pada periode anggaran tertentu (UU. No 32

tahun 2004 tentang pemerintahan daerah). sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut undang-undang RI No. 32 tahun 2004 adalah:

1. Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk membiayai rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
2. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budget tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi

yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan menmperkembangkan perekonomian daerah.

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Kuznet dalam Todaro, 2006)

Menurut Boediono (2008) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita dimana ada dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Output perkapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk.

Menurut Nugreheni (dalam Prasetyo, 2010), pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, beberapa alat ukur pertumbuhan ekonomi antara lain:

a. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB), atau ditingkat regional disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. Baik PDB atau PDRB merupakan ukuran yang global sifatnya, dan bukan merupakan alat ukur pertumbuhan ekonomi yang tepat, karena belum dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk yang sesungguhnya, padahal sesungguhnya kesejahteraan harus dinikmati oleh setiap penduduk di negara atau daerah yang bersangkutan.

b. Produk Domestik Bruto Per Kapita atau Pendapatan Per Kapita

Produk Domestik Bruto Per Kapita atau Produk Domestik Regional Bruto per kapita pada skala daerah dapat digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih tepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu negara atau suatu daerah yang bersangkutan, atau disebut juga sebagai PDB atau PDRB rata-rata.

2.1.4 Hubungan PDRB Perkapita dengan Pendapatan Asli Daerah

Nilai PDRB atau pendapatan perkapita diperoleh dari berbagai pendapatan nasional bruto atau pendapatan domestik bruto pada suatu tahun tertentu dengan jumlah produk pada tahun tersebut. Dengan demikian, pendapatan perkapita dapat dihitung dengan menggunakan salah satu persamaan sebagai berikut (Sadono Sukirno, 2004):

$$a. \text{ Perkapita PNB} = \frac{\text{Pendapatan Nasional Bruto}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

$$b. \text{ Perkapita PDB} = \frac{\text{Pendapatan Domestik Bruto}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Pendapatan perkapita menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar pengeluarannya termasuk mengkonsumsi barang dan jasa. Semakin besar tingkat pendapatan perkapita masyarakat mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu biasanya satu tahun.

Pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran bagi kemakmuran suatu daerah, pendapatan perkapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya menimbulkan intensif bagi diubahnya struktur produksi pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan barang-barang manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat dari pada permintaan akan produk-produk pertanian (Todaro, 2006).

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula permintaan barang dan jasa. Hal ini mengakibatkan semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pajak dan retribusi yang ditarik pemerintah daerah. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

2.1.5 Inflasi

Teori kuantitas uang David Hume dalam Mankiw (2006) menyatakan bahwa bank sentral, mengawasi jumlah uang beredar, memiliki kendali tinggi atas tingkat inflasi, jika bank sentral mempertahankan jumlah uang beredar tetap

stabil, tingkat harga akan stabil. Jika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar dengan cepat tingkat harga akan meningkat dengan cepat.

Menurut Boediono (1985), Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Inflasi dapat terjadi karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. Inflasi ini disebut *demand inflation*. Inflasi juga dapat terjadi karena biaya Produksi naik, ini disebut *Cost Inflation*.

2.1.6 Hubungan Inflasi dengan Pendapatan Asli Daerah

(Case dan Fair, 2006) fakta bahwa ekspektasi bisa mempengaruhi tingkat harga. Ekspektasi bisa menyebabkan kita takut akan perubahan harga. Jika harga naik dan jika ekspektasi masyarakat bersifat adaptif yaitu jika mereka membentuk ekspektasi atas dasar perilaku penetapan harga sebelumnya maka perusahaan mungkin akan terus menaikkan harga meskipun permintaan melambat atau menyusut.

Jika bank sentral menurunkan inflasi dengan memperlambat tingkat pertumbuhan uang, para pekerja tidak akan melihat upah riil mereka naik dengan lebih cepat. Padahal ketika inflasi melambat perusahaan akan sedikit menaikkan harga produk mereka setiap tahun, dan akibatnya akan memberi para pekerja kenaikan upah yang lebih kecil (Mankiw, 2006).

Nopirin (1987) pihak-pihak yang mendapat keuntungan dengan adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan yang persentasenya

lebih besar dari laju inflasi, atau mereka yang mempunyai kekayaan bukan uang dimana nilainya naik dengan prosentase yang lebih besar dari pada laju inflasi. adanya serikat buruh yang kuat kadang kala berhasil dalam menuntut kenaikan upah dengan prosentase yang lebih besar dari laju inflasi. dengan demikian inflasi dapat menyebabkan pola pembagian pendapatan dan kekayaan masyarakat. Simanjutak dalam halim (2001) mengemukakan bahwa inflasi akan meningkatkan PAD yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak hotel dan pajak restoran.

Jumlah uang beredar menentukan tingkat inflasi, semakin banyak uang yang beredar maka inflasi semakin tinggi. Inflasi dianggap sebagai masalah dalam perekonomian karena menurunnya daya beli masyarakat. Tetapi sebenarnya tidak ada yang berubah, dengan adanya inflasi maka upah atau gaji juga naik, karena upah riil tergantung pada produktivitas marjinal tenaga kerja. Kesejahteraan ekonomi tergantung pada harga relatif, bukan pada seluruh tingkat harga. Ketika inflasi melambat perusahaan akan sedikit menaikkan harga produk setiap tahun, yang mengakibatkan pendapatan pengusaha lebih besar dan akan memberi para pekerja kenaikan upah yang lebih kecil. Dalam hal ini pemerintah mengenakan pajak untuk memberikan potensi penerimaan daerah lebih banyak.

2.1.7 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam teori makro mengenai

perkembangan pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu (Gurito,1993)

1. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Pada tahap ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya.

2. Hukum Wegner

Wegner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam pendapatan perkapita meningkat.

Wegner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi sangat besar, yang terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Wegner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap

pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat yang lainnya. Formulasi hukum wegner sebagai berikut:

$$\frac{P_kPP_1}{PPK_1} < \frac{P_kPP_2}{PPK_2} < \dots < \frac{P_kPP_n}{PPK_n}$$

P_kPP : Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : pendapatan per kapita, yaitu GDP/ jumlah penduduk

1,2,...,n : jangka waktu (tahun)

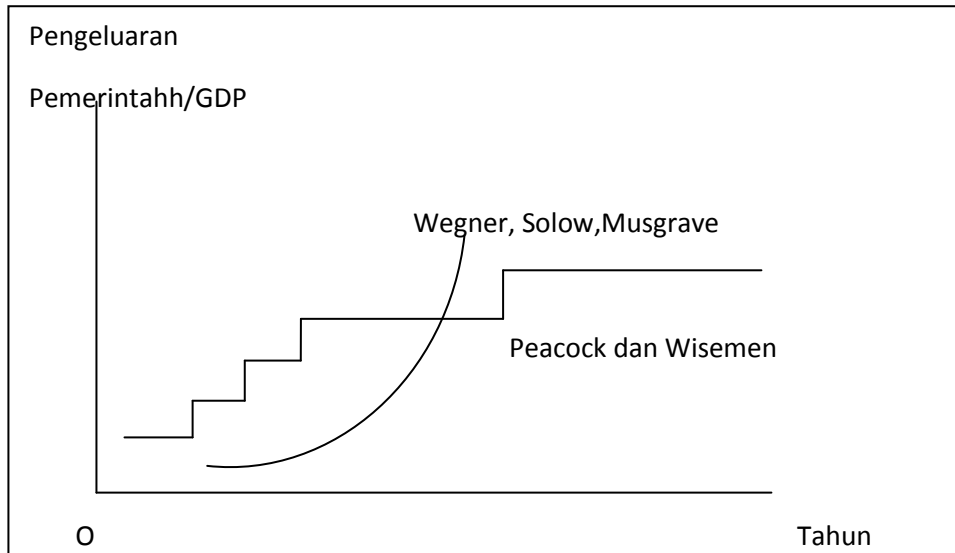
3. Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar tersebut.

Teori Peacock dan Wiseman adalah perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Peacock dan Wiseman menjelaskan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah tidak berbentuk garis tetapi berbentuk seperti tangga yang ditunjukkan oleh gambar 2.2 sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kurva Perkembangan Penegeluaran Pemerintah



Sumber: Guritno (1993)

2.1.8 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pendapatan Asli Daerah

Pigou dalam Guritno (1993) barang publik harus disediakan sampai suatu tingkat dimana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal (*marginal disutility*) akan pajak yang dipungut. Untuk membiayai program-program pemerintah atau untuk menyediakan barang publik. Teori anggaran dalam Guritno (1993) setiap orang membayar atas pungutan barang-barang publik dengan jumlah yang sama sesuai dengan sistem harga untuk barang-barang swasta (*private goods*).

Sadono Sukirno (2004) Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan program yang memerlukan keterlibatan segenap unsur satu lapisan masyarakat. Peranan pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan.

Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi kegiatan ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus menyediakan barang publik, karena tidak ada sektor swasta yang mau menyediakan barang yang dimikmati orang banyak. Aktivitas pemerintah akan beralih dari penyediaan sarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial yang pada akhirnya dapat meningkatkan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah daerah mengenakan pajak dan retribusi daerah sehingga PAD juga meningkat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penyertaan penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya berperan sangat penting dalam sebuah penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini dapat terlihat berdasarkan matriks penelitian terdahulu sebagai berikut.

Tabel 2.1

Matriks Penelitian Terdahulu

No	Nama Jurnal/ Judul Penelitian	Dependen/ Independen Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2003-2007 di kabupaten Karanganyar. (Triani dan Yeni Kuntari: ASET Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol.12 No.1 Maret 2010: 87-94)	Variabel Dependen ; Pendapatan Asli daerah (PAD) Variabel Independen; PDRB, Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi.	Analisis kuantitatif yang dibagi menjadi dua yaitu; Uji asumsi klasik dan Uji regresi linier berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel PDRB berpengaruh negatif terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Karanganyar. 2. Variabel jumlah penduduk secara statistik signifikan berpengaruh terhadap penerimaan PAD . 3. Variabel inflasi menunjukkan berpengaruh negatif terhadap penerimaan PAD. 4. Ketiga variabel makro (PDRB, jumlah penduduk, inflasi) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PAD.
2.	Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2000-2009 di Kota Semarang. (Eni Aryanti dan Iin Indarti: ASET Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol.28 No.2 Oktober	Variabel Dependen ; Pendapatan Asli daerah (PAD) Variabel Independen; PDRB, Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi.	Analisis kuantitatif yang dilaksukn menjadi dua langkah yaitu; asumsi klasik, uji regresi linier berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel PDRB berpengaruh positif terhadap PAD. 2. Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap PAD. 3. Variabel inflasi secara statistik tidak berpengaruh terhadap penerimaan PAD. 4. Variabel PDRB, jumlah penduduk, inflasi memiliki pengaruh terhadap PAD.

	2010: 133-151)			
3.	<p>Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri (Purbayu Budi Santiso dan Retno Puji Rahayu: jurnal Dinamika Pembangunan, Vol.2 No. 1 Juli 2005: 9-18)</p>	<p>Variabel Dependen; Pendapatan Asli Daerah Variabel Independen; total pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, PDRB.</p>	<p>Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Selanjutnya fungsi regresi tersebut akan ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma berganda dengan menggunakan logaritma natural(ln)(Damodar Gujarati. 1991)</p>	<p>Secara bersama-sama variabel pengeluaran pembangunan, penduduk, dan PDRB mampu menerangkan dengan variabel dependennya yaitu variabel PAD. Dari ketiga variabel tersebut yang mempunyai pengaruh paling besar yaitu variabel penduduk.</p>
4.	<p>Pengaruh Pengeluaran pemerintah Terhadap PDRB dan PAD. (Harry A.P: jurnal Ekonomika, vol. 9 No. 1 April 2013)</p>	<p>Variabel Dependen; Pendapatan Asli Daerah. Variabel Independen; Pengeluaran pemerintah sektor pertanian, pengeluaran pemerintah sektor perikanan dan kelautan, pengeluaran pemerintah sektor perindustrian dan</p>	<p>Sebelum menganalisis data maka dilakukan terlebih dahulu uji stasioner data dengan menggunakan augmented dickey-fuller test statistic, Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik.</p>	<p>Pengeluaran pemerintah sektor pertanian, perikanan dan kelautan, sektor industri dan perdagangan baik secara simultan maupun parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap PDRB. Selain itu PDRB berpengaruh signifikan terhadap PAD.</p>

		perdagangan, PDRB		
5.	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surakarta (Skripsi Alfian Norrohman, 2010)	Variabel Dependen: Pajak Daerah Variabel Independen: PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk	Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linier berganda, asumsi klasik	Variabel independen yaitu PDRB, inflasi dan, jumlah penduduk dapat menjelaskan variabel dependen yaitu pajak daerah. disimpulkan bahwa variabel PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kota Surakarta, sedangkan variabel inflasi dan jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kota Surakarta tahun 1994-2007. Kemudian untuk variabel yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Surakarta yaitu PDRB.
6.	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Di Kabupaten Kendal, Demak, Kudus dan Kota Semarang Tahun 2001-2008 (Mohamad Hasanudin: Jurnal Teknis Vol. 6 No. 1 April 2011: 24-30)	Variabel Dependen: Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Variabel Independen: Jumlah Penduduk, PDRB, Inflasi	Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linier berganda, asumsi klasik	Varians penerimaan PBB dapat dijelaskan oleh variabel jumlah penduduk, PDRB, dan Inflasi. Variabel jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan PBB. Variabel PDRB berpengaruh terhadap penerimaan PBB. Inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PBB.
7.	Pengaruh PDRB,	Variabel Dependen:	Teknik analisis yang	Secara simultan bahwa PDRB, Inflasi, investasi

	Inflasi, Investasi Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Mojokerto (Muchtholifah: jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan Vol. 1 No.1 januari 2010)	Pendapatan Asli Daerah Variabel Independen: PDRB, Inflasi, Investasi Industri, Jumlah Tenaga Kerja.	digunakan adalah analisis regresi linear berganda.	industri, dan Jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Mojokerto. Variabel yang paling berpengaruh terhadap PAD adalah variabel PDRB, karena variabel ini memiliki koefisienn determinasi paling besar dari nilai ketiga variabel lain.
8.	Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap PAD Kota Denpasar (Gde Bhaskara Perwira Jaya dan AA Bagus Putu Widanta: jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol.3 No.5 Mei 2014)	Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah Variabel Independen: PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Wisatawan	Ternik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda	PDRB, jumlah penduduk, Jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Denpasar tahun 1997-2011. PDRB berpengaruh positif terhadap PAD Kota Denpasar, Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD Kota Denpasar, sedangkan jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Denpasar.
9.	Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli	Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah Variabel Independen: PDRB, Jumlah	Metode Analisis yang diunakan dalam penelitian ini adalah model Estimasi Random Effect	PDRB tidak mempengaruhi PAD secara signifikan, sedangkan jumlah penduduk mempengaruhi PAD secara signifikan positif dan inflasi mempengaruhi PAD secara

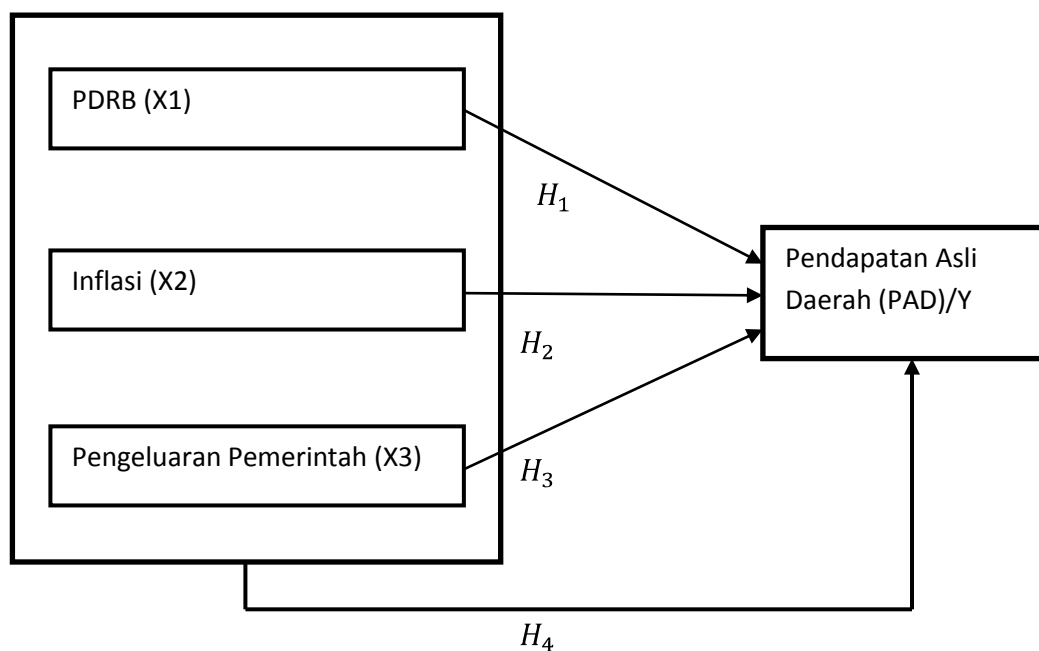
	Daerah Provinsi NTB Tahun 2005-2008 (Skripsi Hidayatullah A. Taufiq, 2011)	Penduduk, Inflasi		signifikan negatif. Secara bersama-sama PDRB, Jumlah Penduduk Inflasi berpengaruh terhadap PAD
10.	Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali (Putu Lia Perdana Sari: jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika Jinah Vol.2 No.2 Juni 2013	Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah Variabel Independen: Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan, Investasi, PDRB	Teknik analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik	<ol style="list-style-type: none"> 1. PAD Provinsi Bali periode 1991-2009 dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah kunjungan wisata mancanegara secara positif 2. Tingkat investasi memiliki pengaruh positif terhadap PAD Provinsi Bali periode 1991-2009 3. PAD Provinsi Bali periode 1991-2009 juga dipengaruhi secara positif oleh PDRB.

2.3 Kerangka pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan kajian terhadap penelitian terdahulu, maka disusun suatu kerangka pemikiran teori mengenai penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran teori dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran Teori



Berdasarkan kerangka pemikiran di atas. Produk Domestik Bruto Per Kapita atau Produk Domestik Regional Bruto per kapita pada skala daerah dapat digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih tepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu negara atau suatu daerah yang bersangkutan, atau disebut juga sebagai PDB atau PDRB rata-rata (Nugreheni dalam Prasetyo, 2010). Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah akan mempertinggi kegiatan ekonomi daerah dan semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

(Case dan Fair, 2006) fakta bahwa ekspektasi bisa mempengaruhi tingkat harga. Ekspektasi bisa menyebabkan kita takut akan perubahan harga. Jika harga naik dan jika ekspektasi masyarakat bersifat adaptif yaitu jika mereka membentuk ekspektasi atas dasar perilaku penetapan harga sebelumnya maka perusahaan mungkin akan terus menaikkan harga meskipun permintaan melambat atau menyusut. Jika bank sentral menurunkan inflasi dengan memperlambat tingkat pertumbuhan uang, para pekerja tidak akan melihat upah riil mereka naik dengan lebih cepat. Padahal ketika inflasi melambat perusahaan akan sedikit menaikkan harga produk mereka setiap tahun, dan akibatnya akan memberi para pekerja kenaikan upah yang lebih kecil (Mankiw, 2006). Simanjutak dalam halim (2001) mengemukakan bahwa inflasi akan meningkatkan PAD yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak hotel dan pajak restoran.

Sadono Sukirno (2004) Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan program yang memerlukan keterlibatan segenap unsur satu lapisan masyarakat. Peranan pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi kegiatan ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan yang dikemukakan dalam perumusan masalah yang akan diuji kebenarannya. Berdasarkan perumusan masalah, teori, konsep, serta kerangka pemikiran yang sebelumnya disajikan, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H1: Variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Daerah Kota Jawa Tengah.
- H2: Variabel Inflasi berpengaruh Positif terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Daerah Kota Jawa Tengah.
- H3: Variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Daerah Kota Jawa Tengah.
- H4: Variabel Makro (PDRB, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah) berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Daerah Kota Jawa Tengah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Pendapatan Asli Daerah merupakan variabel dependen didalam penelitian ini. Sedangkan variabel independennya adalah produk domestik regional bruto, inflasi dan pengeluaran pemerintah.

Definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah menurut BPS adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (dalam satuan rupiah).

b. **Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar harga Konstan**

PDRB menurut BPS merupakan penjumlahan nilai output bersih (barang dan jasa akhir) yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi, di suatu wilayah tertentu (Provinsi dan Kabupaten/Kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender). Kegiatan ekonomi yang dimaksud

mulai kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan jasa-jasa (dalam satuan rupiah). PDRB harga konstan adalah PDRB yang dihitung berdasarkan harga pada waktu tertentu (tahun dasar), dimana saat ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2000.

c. Inflasi

Inflasi menurut BPS adalah kejadian apabila tingkat harga-harga dan biaya-biaya umum naik secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang (dalam satuan persen).

d. Pengeluaran pemerintah

Pengeluaran pemerintah menurut BPS adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (dalam satuan rupiah).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu yang berupa data panel (pooling data) atau data longitudinal. Data panel adalah sekelompok data individu yang diteliti selama rentang waktu tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, antara lain:

1. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Kota Se Jawa Tengah kurun waktu 2003-2012 bersumber dari BPS Propinsi Jawa Tengah.
2. Data PDRB Daerah Kota Se Jawa Tengah atas dasar harga konstan tahun 2000 pada kurun waktu tahun 2003-2012 bersumber dari BPS Propinsi Jawa Tengah

3. Data Inflasi Daerah Kota Se Jawa Tengah Kurun waktu 2003-2012 bersumber dari BPS Propinsi Jawa Tengah.
4. Data Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Se Jawa Tengah kurun waktu 2003-2012 bersumber dari BPS Propinsi Jawa Tengah.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu usaha dasar untuk mengumpulkan data dengan prosedur standar. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu mengumpulkan catatan-catatan atau data-data yang diperlukan sesuai penelitian yang akan dilakukan dari dinas/kantor/instansi atau lembaga terkait (Arikunto, 2002). Data sekunder tersebut diperoleh dari dokumen resmi yang dikeluarkan instansi yang terkait. Pengumpulan dilakukan dengan studi pustaka dari buku-buku, laporan penelitian, buletin, jurnal ilmiah dan penelitian lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3.4 Metode Analisis

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun dan Efendi dalam Sahara, 2004).

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yaitu nilai data yang dinyatakan dalam skala numerik untuk mengetahui perubahan nilai variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah yang disebabkan karena adanya perubahan pada variabel-variabel independen dalam penelitian ini, maka metode analisis regresi yang digunakan adalah metode kuadrat terkecil biasa (*ordinary least squares/OLS*).

3.4.1 Deteksi Asumsi Klasik

Suliyanto (2005) dalam bukunya menyatakan model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat kecil biasa (*ordinary least squares/OLS*) merupakan model regresi yang menghasilkan estimator linear tidak bias yang terbaik (*best linear unbiased estimator/BLUE*). Untuk mendapatkan kondisi tersebut, model regresi harus memenuhi beberapa asumsi yang disebut dengan asumsi klasik. Oleh karena itu, selanjutnya model regresi dalam penelitian ini dilakukan pengujian sebagai berikut:

3.4.1.1 Deteksi Multikolinearitas

Multikolinearitas mengandung arti bahwa ada hubungan linear yang sempurna atau pasti terjadi beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. Konsekuensi adanya multikolinearitas koefisien regresi variabel tidak tentu dan kesalahan menjadi tidak terhingga. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Multikolinearitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan *auxiliary regression* untuk mendeteksi adanya multikolinearitas kriterianya adalah jika R^2 regresi persamaan utama lebih besar dari R^2 *auxiliary regression* maka dalam model tidak terjadi multikolinearitas.

3.4.1.2 Deteksi Heteroskedastisitas

Salah satu penting dalam regresi linear klasik adalah bahwa gangguan yang muncul dalam regresi populasi adalah homokedastisitas, yaitu semua gangguan memiliki varians yang sama atau varian setiap gangguan yang dibatasi untuk nilai tertentu mengenai pada variabel-variabel independen berbentuk nilai

konstanta yang sama dengan σ^2 . Dan jika suatu populasi yang dianalisis memiliki gangguan yang variansnya tidak sama maka mengindikasikan terjadinya kasus heterokedastisitas. Heteroskedastisitas adalah kondisi dimana *error term* tidak memiliki suatu varians yang konstan untuk sama dengan observasi. Masalah heterokedastisitas lebih sering terjadi pada data *cross section* dari pada *time series* serta muncul baik pada regresi sederhana maupun regresi berganda.

Beberapa cara untuk menguji adanya heterokedastisitas salah satunya dengan cara pengujian *White Heteroskedasticity*. Pedoman dari penggunaan model White adalah menolak hipotesis yang mengatakan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model empiris yang sedang diestimasi. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan membandingkan nilai $Obs^* R\text{-squared}$ uji White dengan nilai X^2 tabel. Jika nilai probabilitas $Obs^* R\text{-squared}$ nya lebih besar dari α berarti tidak ada heteroskedastisitas, demikian pula sebaliknya.

3.4.1.3 Deteksi Autokorelasi

Autokorelasi adalah pengujian ada atau tidaknya korelasi antara *error term* pada suatu observasi dengan *error term* pada observasi lain, dengan kata lain munculnya suatu data dipengaruhi oleh data sebelumnya. Masalah autokorelasi lebih sering muncul pada data yang bersifat *time series* serta dapat terjadi baik pada regresi sederhana maupun regresi berganda. Dampak autokorelasi adalah:

(1) variabel terikat pada suatu observasi berhubungan dengan observasi lain. (2) penduga OLS memiliki varians yang bias kebawah atau standart error cenderung lebih kecil. (3) nilai estimasi OLS tidak menghasilkan BLUE karena walaupun tetap lancar unbiased tetap tidak efisien (varian undetermined). (4) uji F dan uji t

tidak dapat dipercaya, karena *standart error koefisien* regresi selalu rendah. Salah satu cara menguji adanya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Breuch-godfrey (BG Test) (Gujarati, 2009). Jika nilai probabilitas $Obs * R\text{-squared}$ -nya lebih bebar dari X^2 tabel maka model tidak ada autokorelasi, demikian pula sebaliknya.

3.4.1.4 Deteksi Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah residual yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual distribusi normal merupakan suatu kurva berbentuk lonceng (*bell – shaped curve*) yang kedua sisinya melebar sampai tidak terhingga. Distribusi data tidak normal karena terdapat nilai ekstrem dalam data yang diambil (Suliyanto dalam Made, 2011). Dalam penelitian ini menggunakan Jarque-Bera Test (J-B Test) yang dilakukan dengan menghitung nilai skewness dan kurtosis untuk melihat apakah data terdistribusi normal atau tidak. Jika nilai J-B hitung $<$ nilai X^2 (tabel chi squared). Maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya.

3.4.2 Pengujian Statistik

3.4.2.1 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan uji distribusi F. Caranya adalah dengan membandingkan antara nilai kritis $F\text{-tabel}$ dengan nilai $F\text{-hitung}$ yang terdapat pada Tabel *Analysis Variance* dari hasil perhitungan. Pengujian terhadap pengaruh variabel independen secara simultan terhadap perubahan nilai variabel dependen dilakukan melalui pengujian terhadap

besarnya perubahan nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh perubahan semua variabel independen (Algifari dalam Made,2011).

Hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, variabel bebas (X) yaitu produk domestik regional bruto (PDRB), inflasi, pengeluaran pemerintah secara simultan tidak ada pengaruh secara nyata terhadap variabel terikat (Y) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. H_1 : paling tidak salah satu koefisien (β) $\neq 0$, variabel bebas (X) yaitu produk domestik regional bruto (PDRB), inflasi, pengeluaran pemerintah secara simultan ada pengaruh secara nyata terhadap variabel terikat (Y) Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada tingkat signifikansi (α) 5% pengambilan keputusan menggunakan pengujian sebagai berikut:

1. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, berarti bahwa secara bersama-sama variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y.
2. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti bahwa secara bersama-sama variabel X berpengaruh terhadap Y.

3.4.2.2 Uji t

Uji t dilakukan untuk memastikan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Imam Ghozali, 2005).

Hipotesis yang digunakan adalah dengan menggunakan taraf nyata sebesar 5% perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

1. $H_0 : b_1 \leq 0$, variabel produk domestik regional bruto tidak berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

$H_1 : b_1 > 0$, variabel produk domestik regional bruto berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

2. $H_0 : b_2 \geq 0$, variabel inflasi secara individu berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah.

$H_1 : b_2 < 0$, variabel inflasi berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah.

3. $H_0 : b_3 \leq 0$, variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

$H_1 : b_3 > 0$, variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Pengembalian keputusan:

1. Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, berarti bahwa secara individu variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y.

2. Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti bahwa secara individu variabel X berpengaruh terhadap variabel Y.

3.4.2.3 Koefisien determinasi

Analisis determinasi R^2 digunakan untuk mengetahui prororsi sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel independen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar prosentase nilai variabel independen yang digunakan dalam model penelitian mampu menjelaskan variasi variabel dependen (Duwi Priyanto dalam Made, 2011).

Berikut adalah dua sifat R^2 :

1. R^2 merupakan besaran non negatif.
2. Batasnya adalah $0 \leq R^2 \leq 1$. Suatu R^2 sebesar 1 berarti suatu kecocokan sempurna, sedangkan R^2 yang bernilai nol berarti tidak ada hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel yang menjelaskan.

Dalam hubungan regresi, R^2 adalah ukuran yang lebih berarti dari pada R karena R^2 mengatakan bahwa persivariansi dalam variabel tak bebas yang dijelaskan oleh variabel yang menjelaskan dan karenanya memberikan suatu ukuran keseluruhan mengenai sejauh mana variasi dalam satu variabel menentukan variasi dalam variabel lain tetapi R tidak mempunyai nilai seperti itu (Damodar Gujarati, 2009).